

**PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA
PERUSAHAAN DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST***

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2010- 2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

KRISNAULI
NIM. 12030110141084

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Krisnauli
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141084
Fakultas/Jurusan : Ekonomika/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGENCY COST**
(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, Macc, Akt.

Semarang, 27 Februari 2014

Dosen Pembimbing

(Dr. P. Basuki HadiPrajitno, MBA, Macc, Akt.)

NIP. 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Krisnauli

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141084

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA
PERUSAHAAN DAN STRUKTUR
KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST***
(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Maret 2014

Tim Penguji

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
2. Moh. Didik Ardiyanto, S.E., Msi. Akt. (.....)
3. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Krisnauli, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap *Agency Cost* (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

Krisnauli

NIM: 12030110141084

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of corporate governance mechanisms and ownership structure to agency cost. The dependent variable is agency cost which is proxied as asset turn over (ATO). Independent variable are corporate governance mechanism which is proxied by size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the board of directors, size of the audit committee. Ownership structure which is proxied by managerial ownership and institutional ownership.

This study was used secondary data from annual reports of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. Samples were 40 manufacturing companies. This study used purposive sampling method and multiple linear regression as the analysis method. Before being conducted by regression test, it was examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that the size of the board of directions, size of the audit committee, managerial ownership, and institusional ownership did not have significant influence to the agency cost. The size of the board of commissioners and the board of independent commissioners have significant influence to the agency cost.

Keywords: agency cost, corporate governance mechanisms, ownership structure, size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the board of directors, size of the, audit committee, managerial ownership, and institusional ownership.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya keagenan yang diproksikan oleh *Asset Turn Over* (ATO) dan variabel independennya adalah mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit. Struktur kepemilikan diproksikan oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2012. Sampel berjumlah 40 perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.

Kata kunci : biaya keagenan, mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berakar, Bertumbuh, Berbuah

*Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan
kita, sebab Ia , yang menjanjikan adalah , setia.*

Ibrani 10:23

*Our greatest glory is not never falling, but in rising up every time
we fall*

(Ralph Waldo Emerson)

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Tuhan Yesus Kristus

dan

*Keluargaku yang selalu hadir dengan
Doa, Perhatian, Dukungan dan
Kepercayaannya*

***Bapa, Mama, Abangku Hanriyanto dan
Adikku Kristian Haris***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan bimbinganNya dan selalu memberkati penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap *Agency Cost* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. selaku dosen pembimbing atas motivasi, perhatian, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu

penulis selama proses studi.

7. Keluarga yang selalu ada dengan Doa dan Kepercayaannya (Bapa, Mama, Abang Hanriyanto, dan Kristian Haris), dan sanak keluarga lain. Kalian tak pernah berhenti untuk menemani, memberi semangat dan memberi masukan. Lebih besar dari itu semua terimakasih untuk Doa dan Kepercayaan yang selalu kalian berikan setiap saat untuk penulis.
8. Keluarga TEATER OBKIAL Ondy Yanuar, Melvin Silalahi, Yosua Martin Sinaga, Enny Yulia Natasari, Maria Carolin Hutasohit, Tri Puji Kristia, Remy Joseph Dimara, Rado Purba, Robby Wijaya Keliat, Yonatan Pasaribu, Prawira Putri Situmorang, Abram Andalen Ginting, Putri Virgo Sinaga, Gyna Lea Jelita, Claudia Sitanggang. Perjalanan bersama kalian adalah hal yang terspecial dan berharga. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan, perhatian dan kebersamaan yang telah menghiasi dunia perkuliahan ini.
9. Saudari-saudari titipan Tuhan yang setia menemani dari hari pertama menginjakkan kaki di Undip ini. Maulida Thia, Rahma Indria, Yulia Gea, Septyana Bella, Gupitasari, Roshella, Sandiba. Terimakasih untuk setiap hal yang telah kalian berikan, dukungan, perhatian, dan teguran yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. PMK FEB UNDIP angkatan 2010 Adiel, Esynasali, Brilliant, Yosevine, Milka, Ari Putra, Yosua, Getha, Gusrida, Agnes, dan seluruh Pmkers 2010 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk selalu ada mendukung dan memberi semangat, menampar, dan merangkul selama ini. Terberkati dengan kebersamaan bersama kalian.

11. Bala Pasukan Anak B yang telah memberi warna yang berbeda di dunia perkuliahan ini. Bhagas, Rahardian, Fajar Jias, Frans Gruber, Marcel, Fahmi, Raymond, Dhanindra, dan semua Anak B yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Aku bangga disatukan bersama kalian semua.
12. Keluarga besar PMK FEB Undip, Obkial, dan Refomedia Bang Binsar, Mas Mike, Bang Renhard, Ka Yeyen, Ka Hayu, Mas Edo, Bang Togi, Ka Winda, Kak Okta, Ka Vera, Debby, Randy, Andrian, Eliana, Evans, Paguh, Janet, Astuti, Mutiara, Frans, Yuli, Yosi, Vijay, Ruben, Sormin, Triando dan seluruh anggota Pmkers yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan.
13. Kawan seperjuangan Akuntansi 2010 R2 terimakasih untuk kebersamaannya yang dan segala bentuk dukungan. Tetap semangat untuk kita semua.
14. Teman seperjuangan bimbingan, Panggih, Andhika, Ina, Hisyam yang sudah melewati kurang lebih satu tahun bimbingan bersama. Terimakasih untuk bantuan selama pembuatan skripsi ini.
15. KKN Tim 2 2013 Desa Brayoy Kec Wonotunggal, Batang. Terimakasih untuk segala bentuk dukungannya, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Jika ada kata lebih dari terimakasih itu yang akan penulis ucapkan untuk kalian semua.

Semarang, 28 Februari 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11

2.1.1.	Teori Agensi.....	11
2.1.2.	Tata Kelola Perusahaan.....	14
2.1.2.1.	Dewan Komisaris.....	17
2.1.2.2.	Komisaris Independen.....	18
2.1.2.3.	Dewan Direksi.....	19
2.1.2.4.	Komite Audit.....	21
2.1.3.	Struktur Kepemilikan.....	22
2.1.3.1.	Kepemilikan Manajerial.....	23
2.1.3.2.	Kepemilikan Institusional	24
2.1.4.	Biaya Keagenan	25
2.2.	Penelitianan Terdahulu.....	27
2.3.	Kerangka Pemikiran	31
2.4.	Perumusan Hipotesis	31
2.4.1.	Ukuran Dewan Komisaris dan Biaya Keagenan.....	31
2.4.2.	Ukuran Komisaris Independen dan Biaya Keagenan	33
2.4.3.	Ukuran Dewan Direksi dan Biaya Keagenan	34
2.4.4.	Ukuran Komite Audit dan Biaya Keagenan	35
2.4.5.	Kepemilikan Manajerial dan Biaya Keagenan.....	36
2.4.6.	Kepemilkan Institusional dan Biaya Keagenan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasi	40
3.1.1.	Variabel Dependensi.....	40
3.1.2.	Variabel Independen	40

3.1.2.1.	Ukuran Dewan	41
3.1.2.2.	Ukuran Komisaris Komisaris Independen	41
3.1.2.3.	Ukuran Dewan Direksi.....	41
3.1.2.4.	Ukuran Komite Audit.....	41
3.1.2.5.	Kepemilikan Manajerial.....	41
3.1.2.6.	Kepemilikan Institusional	42
3.2.	Populasi dan Sampel	42
3.3.	Jenis dan Sumber Data	43
3.4.	Metode Pengumpulan Data	43
3.5.	Metode Analisis Data	43
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.2.1.	Uji Normalitas.....	43
3.5.2.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.2.3.	Uji Multikolinearitas	45
3.5.2.4.	Uji Autokorelasi	45
3.5.3.	Analisis Regresi Berganda	46
3.5.4.	Pengujian Hipotesis.....	47
3.5.4.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.5.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	48
3.5.4.3.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian	49
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Park.....	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.6 Hasil Runs Test	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin-Watson	59
Tabel 4.8 Hasil Regresi Berganda.....	59
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot	54
Gambar 4.2 Grafik Plot	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel	81
LAMPIRAN B Hasil Analisis Data	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang lazim terjadi antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) dalam suatu perusahaan berkaitan dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan merupakan masalah yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Perbedaan ini membawa potensi terjadinya konflik yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan apabila dikelola oleh pemiliknya sendiri. Biaya tersebut disebut dengan biaya keagenan atau *agency cost* (Hadiprajitno, 2013).

Lemahnya *Corporate Governance* ditandai dengan adanya skandal spektakuler, seperti *Enron, WorldCom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell*, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*. Isu terbaru yang ditemukan adalah pengabaian kepentingan para pemegang saham tentang pengembalian atas investasi yang telah dilakukannya. Pada tahun 2008 terdapat skandal keuangan perusahaan besar dunia, seperti *Lehman Brothers* dan *Goldman Sach*. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi skandal yang melanda lembaga keuangan, seperti *JP Morgan, Barclays, UBS*, dan lain sebagainya. Kasus skandal

tersebut membuktikan bahwa kurangnya proteksi terhadap pemegang saham serta tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga dapat terjadi asimetris informasi antara prinsipal dan agen yang menggambarkan adanya pihak yang dapat menggelapkan dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham tersebut (Lestari, 2013).

Indonesia belum mempunyai kualitas tata kelola perusahaan yang baik, hal ini dibuktikan oleh hasil survey dari Bozz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks tata kelola perusahaan paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia ini menjadi salah satu faktor utama kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Hadiprajitno, 2013). Terdapat beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia. Menurut Hardikari (2011), ada beberapa kasus manipulasi pelaporan keuangan yang terjadi di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk.

Para pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya (Darmawati, dkk. 2005). Namun seringkali manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan melakukan berbagai tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain dalam perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perlindungan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Sistem *Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *corporate governance* dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dan ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham pengendali dengan menekankan pada mekanisme legal. Jika mekanisme *corporate governance* tidak diterapkan atau tidak berfungsi dengan baik dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan pemegang saham dan nilai perusahaan.

Corporate Governance terjadi ketika adanya pemisahan kepemilikan antara prinsipal dan agen. Pemisahan tersebut cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara keduanya. Jika suatu perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka diharapkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dari *corporate governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas. Suatu keberhasilan dari adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah perusahaan memiliki suatu pengelolaan yang baik, sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, dikendalikan (Lestari, 2013).

Perusahaan dalam operasinya memerlukan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pemilik, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk menentukan tujuan perusahaan dan pengukuran kinerja serta kewenangan dan pengendalian manajemen. Kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari sudut konsep tata kelola perusahaan, pemilik sebagai mekanisme eksternal, yang berhubungan kuat dengan dewan komisaris dan direksi. Mekanisme tata kelola

perusahaan tidak terbatas pada jumlah dan komposisi dewan dan komite audit (Hadiprajitno, 2013).

Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan pada penelitian ini disesuaikan variabel yang cocok dengan karakteristik perusahaan di Indonesia, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian ini memilih mekanisme tersebut karena dianggap berpengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance*, dimana keenam mekanisme tersebut bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir masalah keagenan yang mungkin akan terjadi akibat perbedaan kepentingan, dan akan mengurangi biaya keagenan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO). Semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen, dan semakin efektif juga dalam memaksimalkan kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen atau eksternal dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) juga sependapat dengan mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan akan terjadi konflik yang semakin rendah. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya biaya keagenan.

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan ukuran dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen perusahaan dan memonitor perusahaan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan (Noorizkie, 2013). Dengan operasi perusahaan yang optimal, maka akan menaikkan kepercayaan prinsipal yang akan mengurangi biaya keagenan.

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal. Eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan mereduksi biaya keagenan (Noorizkie, 2013).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang

saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajer dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajemen dan dapat mengurangi biaya keagenan.

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen (Noorizkie, 2013). Januarti (2008) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, sehingga diharapkan adanya *monitoring* atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau sesuai dengan yang diharapkan prinsipal karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Noorizkie, 2013).

Penelitian mengenai *corporate governance* yang mempengaruhi biaya keagenan perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Konflik antara agen dan prinsipal telah diteliti oleh beberapa peneliti. Jensen dan Meckling (1976) merupakan pencetus penelitian mengenai masalah keagenan yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai:

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principles) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Jensen dan Meckling juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih besar akan menurunkan biaya keagenan. Bila perusahaan dikelola 100% oleh pemiliknya sendiri, maka biaya keagenan bisa tidak ada (Jensen dan Meckling, 1976). Struktur kepemilikan manajerial yang tinggi menyebabkan terjadinya pembentengan (*entrenchment*), yaitu tindakan yang bertujuan dalam hal mengamankan kepentingan prinsipal mayoritas tersebut, namun seharusnya dinikmati oleh manajer dan biayanya dibebankan kepada pemilik (Shliefer dan Vishny, 1997). Berawal dari teori keagenan, kemudian banyak penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai tata kelola perusahaan maupun biaya keagenan.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa biaya keagenan akan lebih tinggi jika perusahaan dikelola oleh manajer independen. Sebaliknya biaya keagenan akan lebih rendah jika kepemilikan manajerial semakin tinggi dan biaya keagenan lebih rendah ketika hutang bank lebih tinggi (Ang, dkk. 2000). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Berger, dkk. (1997).

Hasil penelitian terdahulu masih banyak ditemukan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama yang menemukan struktur kepemilikan institusi keuangan terhadap masalah keagenan tidak signifikan (Siregar dan Utama, 2008). Ghosh, *et al.* (2010) menyatakan bahwa komite independen tidak signifikan. Hal ini bertentangan dengan pernyataan peneliti lainnya. Oleh sebab itu, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan mempengaruhi biaya keagenan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian Sajid, *et al.* (2012) tentang mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan yaitu biaya keagenan yang diukur dengan *Asset Turn Over* (ATO) dan variabel independennya yaitu mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, serta struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Objek penelitian yang digunakan adalah sektor manufaktur dikarenakan sektor manufaktur merupakan salah satu bagian sektor yang terbesar di Indonesia, dan merupakan sumber pemasukan yang cukup besar bagi negara.

Latar belakang yang telah dipaparkan menjadi dasar untuk penelitian ini. Maka penelitian ini bermaksud memberikan bukti empiris mengenai hubungan mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan, yang dapat menunjukkan seberapa besar agen dan prinsipal mampu mengurangi biaya keagenan bahkan sampai meniadakannya.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar dalam menarik rumusan masalah dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) dan struktur kepemilikan terhadap *Agency Cost* (Biaya

Keagenan)”. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *agency cost* ?
2. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap *agency cost* ?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *agency cost*?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *agency cost*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *agency cost*?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *agency cost*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang disampaikan menjadi dasar dalam menyusun tujuan dan manfaat penelitian. Maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme tata kelola, struktur kepemilikan pada biaya keagenan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai biaya keagenan serta menambah pengetahuan bagaimana dalam mengelola biaya keagenan perusahaan. Selain itu, dapat menjadi acuan dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2) Manfaat praktis

Penelitian mengenai biaya keagenan sangat penting dipahami oleh praktisi untuk membantu pengambilan keputusan dalam menilai suatu perusahaan dan menentukan keputusan investasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, sistematika penulisan yang menguraikan bagaimana penelitian ini dapat dipaparkan. Bab kedua pada penelitian ini memuat landasan teori yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis. Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berisikan variabel penelitian, definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab keempat menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pengujian hipotesis. Terakhir bab kelima berisi simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori agensi merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dan agen. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori Keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran menurut Jensen dan Meckling, (1976) meliputi: (1) *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen. (2) *Prinsipal Agen Literature*,

memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen.

Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Manajemen bisa melakukan berbagai tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk

melakukan rekayasa. Oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik saham perusahaan dengan manajer investasi sebagai agen. Pemegang saham sebagai penyedia dana dan fasilitas, memiliki kepentingan mengamankan dana dan fasilitas tersebut atas operasi perusahaan karena pemegang saham berkepentingan atas keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Manajer sendiri sebagai pengelola perusahaan mendapatkan gaji dari perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil manajer diharapkan dapat memakmurkan pemegang saham dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Theresia (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* (tata kelola perusahaan) merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*.

Teori keagenan memberikan landasan utama dalam kaitannya dengan penyediaan informasi tentang aktivitas yang telah terjadi. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga sangat dibutuhkan pihak yang kompeten dalam menyediakan informasi berkaitan dengan risiko dan pengendalian kemungkinan sifat *opportunistic* agen. Adanya pihak yang kompeten untuk menangani pengendalian risiko akan memiliki *agency cost* yang rendah (Wahyuni, 2012).

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* tata kelola perusahaan (*coporate governance*) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Secara prinsip, tata kelola perusahaan dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu aspek struktur tata kelola perusahaan atau struktur dewan dimana titik fokusnya adalah bentuk dan aspek proses tata kelola perusahaan atau mekanisme tata kelola perusahaan dimana titik fokusnya adalah cara bekerja. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit (Kusumawardhani, 2012).

Menurut Mulia (2010), tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah keagenan. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan

untuk menutupi informasi untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua mekanisme, mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme pencegahan kesalahan internal terdiri dari komite audit, komite pemantauan resiko, audit internal, dan pemantauan resiko, yang membantu dewan komisaris dalam menciptakan sistem pengendalian. Mekanisme eksternal termasuk auditor eksternal, otoritas regulasi, dan pemegang saham. Pemilik memegang peran penting dalam penentuan struktur perusahaan, meliputi: ukuran dan jenis bisnis, arah pengembangan bisnis, jumlah pemilik yang dominan, pertimbangan pajak strategi perusahaan, kebijakan profesional, struktur modal perusahaan, pertimbangan pembiayaan perusahaan, kebijakan investasi, alokasi resiko, dan bentuk pengendalian (Hadiprajtno, 2013).

Di Indonesia, *Code of Good Corporate Governance* dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance. Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kesesuaian fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengolahan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responbilty* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundangan yang berlaku.

Manfaat yang diberikan dengan adanya tata kelola perusahaan yang disampaikan oleh FCGI, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *coporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai tujuan manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan kinerja dan mengurangi masalah keagenan. Mekanisme tata kelola perusahaan sama kedudukannya dengan struktur kepemilikan, yaitu memberikan dampak pada kualitas pengendalian termasuk mempersempit perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.

2.1.2.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggungjawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian (Laila, 2011).

Peran komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi

dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proposional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

2.1.2.2 Komsiaris Independen

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Darwis, 2009).

Menurut Fama dan Jensen (1983) komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya biaya keagenan dapat ditekan.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

2.1.2.3 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-

kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan baik dewan direksi dan dewan komisaris berbeda-beda. Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan.

2.1.2.4 Komite Audit

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan No. IX. 15. Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris. Menurut Forker (1992) komite audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal.

Dalam tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit dan eksternal.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/ dewan pengawas.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Dalam peraturan No. IX. 15 disebutkan bahwa komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau

perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan, khususnya jumlah mayoritas (baik sendiri-sendiri maupun bersama) akan menentukan luas dan intensitas pengendalian kepada manajemen. Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah presentase saham yang dimiliki oleh pihak *insider shareholder* dan pihak *outsider shareholder*. Pihak *insider* yaitu pemegang saham yang berada di jajaran direktur dan komisaris. Pada pihak *outsider* yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain. Kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari sudut konsep tata kelola perusahaan, pemilik sebagai mekanisme eksternal, yang berhubungan kuat dengan dewan komisaris dan direksi (Hadiprajitno, 2013).

Masalah keagenan merupakan suatu masalah yang timbul akibat pihak yang terlibat mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan lain. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jadi *agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan, karena dengan adanya struktur kepemilikan yang terstruktur, dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan.

Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik.

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Menurut Jansen dan Meckling (1976) salah satu cara guna untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Hal itu berarti bahwa kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial juga dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham sehingga manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dan dampak dari keputusan yang diambil dari pengambilan keputusan yang salah (Gelisha, 2011).

Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajer cenderung berusaha lebih giat dan termotivasi untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal karena manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Gelisha, 2011).

Manajer akan berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga menurunkan biaya keagenan serta dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan (Tarjo, 2008). Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama peseorangan pribadi (Sekaredi, 2011). Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Menurut Barnae dan Rubin (2005), *institutional shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi maka akan

semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Selain itu, pengawasan terhadap manajer berlangsung baik dan mengurangi biaya keagenan.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Cruthley, *et al.* (1999) yang menemukan bahwa *monitoring* yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

2.1.3 Biaya Keagenan

Masalah agensi yang disebabkan karena masalah kepentingan antara prinsipal dan agen dan adanya asimetris informasi. Masalah Keagenan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang harus dikeluarkan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan terdiri dari:

- (a) *The monitoring expenditures by the principle.* Biaya *monitoring* dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction, dan compensation policies*. Biaya pengawasan oleh prinsipal seperti: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan

penegakkan peraturan atau kebijakan peraturan khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan biaya terkait ekuitas pihak luar.

- (b) *The bonding expenditures by the agent. The bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Biaya ini juga sering disebut dengan biaya pengikatan oleh agen. Biaya pengikatan ini seperti: biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait *covenant* dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*. Kerugian residual yang mungkin ada seperti: resiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Besaran biaya keagenan ini dapat dibatasi dengan kualitas pengendalian oleh pemilik dan pihak ketiga yang menerima delegasinya (seperti bank) yang memantau tindakan manajer dari luar.

Mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan diantaranya dengan mekanisme kontrol dan *monitoring* seperti, pembentukan dewan komisaris, pasar *corporate control*, pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi, dan pasar manajer. Mekanisme kedua adalah mekanisme kontrol dengan peningkatan kepemilikan manajer, dan yang ketiga adalah dengan mekanisme kontrol dengan *bonding* (Arifin, 2002).

Penelitian ini menggunakan rasio perputaran aset (*asset turn over*) sebagai proxy biaya keagenan. Perputaran aset yaitu rasio yang mengukur efektifitas manajemen perusahaan dalam menggunakan asset. Rasio asset terhadap penjualan yang tinggi mengindikasikan asset secara signifikan meningkatkan penjualan yang juga meminimumkan biaya keagenan. Rasio perputaran asset yang rendah berarti manajemen perusahaan mengimplikasikan kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Rendahnya rasio ini mengindikasikan tingginya biaya keagenan dan penggunaan asset yang tidak efisien dan efektif (McKnight dan Weir, 2008).

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap biaya keagenan diringkas dan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Chrisostomos Florackis dan Aydin Ozkan (2009)	Variabel Dependen: <i>Agency cost</i> Variabel Independen: <i>Manajerial compensation, board of directors, ownership concentration, managerial ownership, debt financing</i>	<i>Cross sectional regression</i>	Karakteristik struktur modal perusahaan, yaitu utang bank dan jatuh tempo utang, merupakan dua dari perangkat tata kelola perusahaan yang paling penting bagi perusahaan-perusahaan Inggris. Juga, kepemilikan manajerial, kompensasi manajerial dan konsentrasi

				kepemilikan tampak untuk memainkan peran penting dalam mengurangi biaya agensi.
2.	Philip. J Meknigh dan Charlie Weir (2009)	Variabel Dependen: Biaya keagenan Variabel Independen: <i>Board Characteristic</i> , struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional	<i>Fixed-effects, instrumental variables, and Tobit regressions</i>	Komite nominasi meningkatkan biaya keagenan, meningkatkan kepemilikan dewan mengurangi biaya keagenan dan hutang akan mengurangi biaya keagenan
3.	Etha Rizki Aryani (2011)	Variabel Dependen: <i>Agency cost</i> Variabel Independen: Komposisi dewan, Kepemilikan institusional, kepemilikan BUMN, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi	Regresi berganda	Variabel yang mempengaruhi biaya keagenan adalah variabel kepemilikan BUMN, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi biaya keagenan adalah komposisi dewan dan kepemilikan terkonsentrasi
4	Linda (2012)	Variabel Dependen: Biaya keagenan Variabel Independen: Eksekutif direktur, non-eksekutif, komite audit, <i>short debt</i>	Teknik PLC	Komite audit mengurangi biaya keagenan, rasio debt jangka pendek, komite komisaris dan eksekutif meingkatkan biaya keagenan
5.	Gul Sajid, Muh.Saji,	Variabel Dependen:	<i>Multivariate fixed</i>	Perusahaan dengan stuktur kepemilikan

	Nasir Razzaq (2012)	<p><i>Agency cost</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Board size, board independence, CEO/Chair duality, Remuneration structure, manajerial ownership, institusional ownership, external ownership</i></p>	<i>regression</i>	<p>manajerial institusional dapat mengurangi biaya keagenan. Komposisi dewan yang lebih kecil maka mengurangi biaya keagenan. Dewan komisaris independensi berhubungan positif dengan biaya keagenan. Serta pemisahan antara CEO dan Chairman, dewan remunerasi yang tinggi akan mengurangi biaya keagenan</p>
6	Basuki Hadiprajit no (2013)	<p>Variabel Dependen: Biaya keagenan</p> <p>Variabel Independen: Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, komite remunerasi</p>	Analisis regresi multivariat	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, keuangan kepemilikan institusi, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada <i>agency cost</i> yang diprosikan dengan biaya operasi dan aset turnover, dibandingkan dengan kepemilikan publik. Selain itu, konsentrasi kepemilikan masing-masing minimal 5 persen tidak terbukti untuk mempengaruhi biaya keagenan. Hasil pemeriksaan lainnya menunjukkan bahwa proporsi independen dan jumlah rapat dewan memiliki</p>

				<p>pengaruh negatif terhadap <i>agency cost</i> (aset turnover). Namun, dua variabel tersebut dan jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh berlawanan dengan <i>agency cost</i> ketika proxy sebagai beban operasi.</p>
--	--	--	--	--

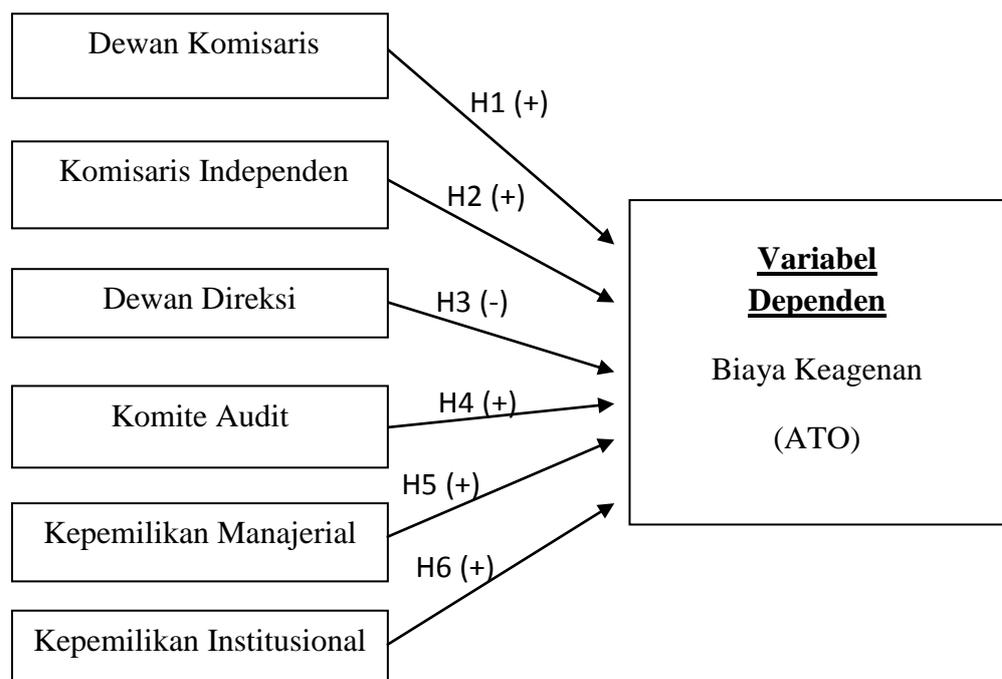
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Struktur Kepemilikan



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh sebab itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Menurut Jensen (1993) fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005).

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan biaya keagenan dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar melakukan hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kefektifan dewan komisaris akan mengindikasikan tingginya perputaran asset. Semakin besar ukuran dewan komisaris berarti akan semakin besar pengawasan terhadap

manajemen, sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan pemegang saham serta meningkatkan rasio perputaran asset, dan pada akhirnya akan menekan biaya keagenan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diprosikan dengan ATO

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap *Agency Cost* (Biaya keagenan)

Komisaris independen menunjukkan pihak yang dapat berperan sebagai pengawas manajemen dalam melaksanakan sistem *corporate governance*. Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen (Laila, 2011).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajemen. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap penekanan biaya keagenan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer untuk melakukan sesuai dengan keinginan pemegang saham yang mengindikasikan meningkatkan penjualan dengan ditandai tingginya rasio perputaran asset, dan akan mengurangi biaya keagenan.

Hasil penelitian Beasley dan Salterio (2001), Kusnadi (2003), McKnight dan Mira (2003), Henry (2004), Ghosh, dkk. (2010) menemukan bahwa dewan komisaris yang semakin besar mengurangi terjadinya masalah keagenan, sehingga biaya keagenan akan berkurang ketika jumlah komisaris independen semakin tinggi. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diprosikan dengan ATO

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Agency Cost* (Biaya keagenan)

Besar kecil atau ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana proses operasional perusahaan berjalan. Dewan direksi merupakan orang yang diberikan mandat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan pencapaian tujuan

perusahaan. Kefektifan dari dewan sebagai mekanisme dari tata kelola perusahaan bergantung pada jumlah dan komposisinya. Ukuran dewan yang besar kurang efisien jika dibandingkan dengan ukuran dewan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran dewan akan memperbesar jumlah orang yang mengendalikan operasional di perusahaan, berarti informasi yang beredar di dalam perusahaan semakin besar. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi yang semakin besar akan menimbulkan ketidakefektifan dalam manajemen mengimplementasikan kebijakan dan meningkatkan penjualan.

Florackis dan Ozkan (2004) yang menemukan bahwa ukuran dewan yang tinggi akan menimbulkan biaya keagenan yang tinggi juga. Hasil ini dikarenakan oleh kurangnya efisiensi di dalam dewan direksi. Jumlah dewan direksi yang jumlahnya lebih kecil, lebih efektif bagi perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kepercayaan prinsipal kepada agen. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diproksikan dengan ATO

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.15 komite audit adalah komite yang dibentuk

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya masalah agensi. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisir. Menurut Forker (1992) komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Effendi (2005) menyimpulkan keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif sehingga para manajemen akan berusaha meningkatkan penjualan. Meningkatnya penjualan menandakan bahwa manajemen dapat menghasilkan rasio perputaran asset yang tinggi. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam mekanisme *corporate governance* yang baik. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diproksikan dengan ATO

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan.

Menurut Jensen (1993) kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan (*agency costs*) juga dilakukan oleh Crutchley dan Hansen (1989), menyimpulkan bahwa level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini juga didukung oleh Shleifer dan Vishny (1997), kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dalam meningkatkan

kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan ini akan mengindikasikan tingginya rasio perputaran asset. Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Anggraini (2006) semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dan menghasilkan perputaran asset yang tinggi, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diproksikan dengan ATO

2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Agency Cost* (Biaya keagenan)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan

institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Crutchley dan Hansen (1989), Bathala, *et al* (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memonitor manajemen agar bertindak sesuai dengan harapan pemegang saham. Semakin tinggi pengawasan terhadap manajemen akan semakin tinggi pengaruh terhadap manajemen untuk melakukan kinerja dengan baik dan menghasilkan perputaran asset yang tinggi. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan biaya keagenan yang diproksikan dengan ATO

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya keagenan yang akan diukur dengan menggunakan *Assets Turn Over* (Sajid, et al. 2012). *Asset Turn Over* atau rasio perputaran aset didefinisikan sebagai total penjualan dibagi dengan total aset. Rasio perputaran aset mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan sejumlah penjualan. Rasio perputaran aset yang tinggi mengindikasikan aset secara signifikan meningkatkan penjualan yang juga meminimumkan biaya keagenan. Rasio perputaran aset yang rendah berarti manajemen perusahaan mengimplikasikan kebijakan yang tidak efektif dan efisien dan mengindikasikan tingginya biaya keagenan. Peneliti menyesuaikan rumus tersebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, rumus yang digunakan untuk ATO sebagai berikut:

$$\text{ATO} = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Asset}} \quad (3.1)$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan beberapa variabel independen.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris di dalam suatu perusahaan. Variabel ukuran dewan komisaris ini diukur sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

3.1.2.2 Ukuran Komisaris Independen

Ukuran komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presentase jumlah seluruh anggota komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

3.1.2.3 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pengukurannya sebagai berikut:

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah dewan direksi perusahaan.

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Pengukurannya sebagai berikut:

Ukuran Komite Audit = Jumlah Komite Audit perusahaan.

3.1.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan dimana para manajer memiliki saham atas perusahaan. Hal ini menandakan bahwa posisi manajer sebagai agen dan juga sebagai prinsipal. Variabel kepemilikan manajerial ini diukur dengan

presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur.

Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\% \text{ lembar saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

3.1.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Variabel kepemilikan institusional ini, dapat diukur dengan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional.

Pengukurannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\% \text{ lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten pada tahun 2010-2012.
2. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam annual report, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional pada tahun 2010-2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Data sekunder diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2010-2012.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analistik grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Analisis Statistik

Uji yang digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kemudian Ghozali (2013) menyatakan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas. Cara pertama adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis grafik plot adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang kedua untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park. Ghazali (2013) menjelaskan cara bekerja Uji Park adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Menurut Ghazali (2013) cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah Runs Test. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Linear Berganda

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut. Adapun tahap–tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Menghitung mekanisme dari tata kelola perusahaan dalam perusahaan yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Serta struktur kepemilikan yang diproksikan dalam kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.
2. Menghitung *agency cost* (biaya keagenan) yang diungkapkan melalui data–data operasional perusahaan dalam laporan tahunan (*annual reports*).
3. Penghitung model regresi

Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diterapkan oleh peneliti dengan menggunakan software SPSS versi 20.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan dengan *agency cost* diukur dengan rumus berikut:

$$Agency\ Costs = \alpha + \beta_1 DEKOM + \beta_2 KOMINDP + \beta_3 DEDIR + \beta_4 KOMDIT + \beta_5 KEPMAN + \beta_6 KEPINS + \epsilon_i \quad (3.6)$$

Keterangan :

Agency Costs = Indeks dari biaya keagenan perusahaan

α = Konstanta

DEKOM = Ukuran dewan komisaris

KOMINDP = Ukuran komisaris independen

DEDIR = Ukuran dewan direksi

KOMDIT = Ukuran komite audit

KEPMAN = Presentase kepemilikan manajerial

KEPINS = Presentase kepemilikan institusional

ϵ_i = *error term*

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Dapat juga dikatakan bahwa $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan $R^2=1$ menandakan suatu hubungan yang sempurna.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.